

# RUKUN TETANGGA SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sugiyanto

## Abstrak

Ada tiga alasan pentingnya pengorganisasian masyarakat, yaitu 1) di dalam masyarakat terdapat banyak potensi, 2) dalam kehidupan masyarakat rawan terhadap konflik dan 3) masyarakat memiliki aneka kebutuhan<sup>1</sup>. Siapakah aktor utama yang melakukan pengorganisasian masyarakat itu? jawaban atas pertanyaan kedua adalah rukun tetangga (RT). Di Indonesia secara formal RT mulai diberlakukan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983, walaupun sebelum Indonesia merdeka RT telah dirintis oleh Jepang. Dalam perjalanannya RT mampu menjadi basis demokrasi komonitaria, basis pembangunan partisipasi, media publik ditingkat lokal, basis modal sosial, basis desentralisasi, menjadi mobilisasi pembangunan dan mampu menjadi agent pembangunan alternatif.

---

## A. Pendahuluan

**Sugiyanto**  
adalah dosen  
Sekolah Tinggi Pembangunan  
Masyarakat Desa "APMD"  
Yogyakarta dan Nara Sumber  
Masalah-Masalah Sosial  
BK3S Propinsi DIY

Rukun Tetangga (RT) bagaikan "suh" (tali pengikat pada sapu lidi) pada setiap warga terutama para kepala keluarga (KK). Lembaga ini merupakan peninggalan atau warisan pada jaman penjajahan Jepang, sebutan RT pada

---

<sup>1</sup> Hari Martono dan Sugiyanto, Pengorganisasian Masyarakat, (Yogyakarta : STPMD "APMD") hlm. 2-5.

waktu itu adalah *Gamaincho*. *Gamaincho* merupakan tangan panjang lurah yang berada di bawah kepala dusun dan membawa satu wilayah kampung (satu dusun terdiri dari beberapa kampung = di Jawa padukuhan), sebab pada jaman Jepang Rukun Warga (RW) belum ada. Tugas utama RT adalah menjadi parameter kegiatan sosial kemasyarakatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat yang sangat kompleks, secara latten tugas RT membantu kepentingan Jepang melawan musuh-musuhnya dalam perang dunia kedua.

Kebijakan di atas dijadikan strategi oleh Jepang dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah Jepang dalam memobilisasi atas kepentingan-kepentingan pihak penjajah dan aplikasi teknis dari manajemen dan birokrasi, RT dipandang lebih mengena pada sasaran dan harapan pemerintah Jepang. Mengapa Jepang menerapkan sisten Rukun Tetangga, karena Jepang telah mempelajari *culture* masyarakat Indonesia yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia ternyata telah membangun demokrasi sejak jaman nenek moyang dalam situasi gelombang keterbukaan dalam suasana demokratis, hal ini dapat kita buktikan bahwa kesatuan bangsa Indonesia bersifat etis-historis bukan etnik alami. Secara alami dari sudut bangsa, budaya, letak geografis, penghayatan keagamaan dan suku-suku di seluruh Nusantara tidak merupakan kesatuan, sedang faktor yang menyebabkan mereka bersatu dalam satu bangsa Indonesia karena adanya faktor lain, yaitu cita-cita kebangsaan dan cita-cita ini tumbuh berdasarkan pengalaman sejarah bersama seperti pengalaman ketertindasan dan penderitaan jaman penjajahan Belanda sepanjang tiga setengah abad, pengalaman perjuangan bersama dan pengalaman kejayaan (jaman kerajaan) dari sinilah lahir bergelornya semangat untuk bersatu dalam mewujudkan kemerdekaan.

Ruh kerakyatan adalah demokrasi yang menjadi inti salah satu cita-cita untuk melandasi perjuangan kemerdekaan sehingga rakyat melawan penjajah untuk memperjuangkan kemerdekaan berdasarkan kedaulatan rakyat dan bukan daulat tuanku. Jadi kerakyatan merupakan tuntutan inti normative yang mendasari keharusan penciptaan demokrasi Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu maka demokrasi itu akhirnya mengalir kesemua lini institusi-institusi kehidupan politik dan kenyataan ini tidak boleh menutupi consensus

tentang kerakyatan dan kerakyatan tidak dapat menjadi nyata kecuali lewat sistem institusional kekuasaan politik yang disebut demokrasi.

Melalui pemerintah Orde Baru lembaga ini (RT) diperbaiki dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983.<sup>2</sup> Menurut keputusan Menteri Dalam Negeri ini dijelaskan bahwa Rukun Tetangga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan tidak lepas dari ulur tangan RT. Mengapa RT hasil polesan Orde Baru awet atau langgeng dan mampu meresap di dalam elemen-elemen kehidupan masyarakat diprdesaan dan masyarakat perkotaan ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu merunut kembali bahwa RT lahir melalui pemerintah Jepang pada tahun 1942 dan berjalannya sistem pengorganisasian masyarakat paling bawah hingga menjelang Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka sampai awal tahun 1983 sistem pengorganisasian masyarakat paling bawah tidak menggunakan RT sebagai wadahnya sehingga RT tenggelam dalam tata pemerintahan di Indonesia, ketika RT diangkat kembali oleh Orde Baru tahun 1983 agak sulit untuk diterima sebab dengan adanya RT ada sebagian tradisi dalam institusi lokal terpaksa akan terjadi pergeseran fungsi dan perannya. Oleh karena itu ketika RT didengungkan untuk dibentuk di setiap desa dan kelurahan sikap enggan diwarnai oleh situasi pro dan kontra terjadi di berbagai daerah. Entah apa rumus dan resep yang digunakan oleh Orde Baru sehingga kehadiran RT sampai saat ini dapat diterima di lapisan masyarakat walaupun ini merupakan kue paket (*top down*) Orde Baru. Bila RT itu diumpamakan makanan, maka RT merupakan makanan paling lezat untuk melepaskan diri dari makanan yang lezat ini (kegiatan/aktivitas RT). Pada akhirnya RT mengakar pada setiap individu lebih khusus kepada kepala keluarga.

---

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, hlm. 3.

Guna menjawab pertanyaan di atas maka perlu kita runut bahwa keberadaan RT membawa dua misi : *pertama* misi internal bahwa masyarakat Indonesia merasa memiliki kewajiban untuk melestarikan peninggalan nenek moyang yang berupa tradisi musyawarah, hidup dalam nuansa kekeluargaan dan kegotong-royongan. Nuansa hidup kegotong-royongan, musyawarah untuk mufakat bagi setiap KK tercipta melalui wadah RT, forum ini seharusnya dimanfaatkan oleh rakyat untuk merembug kompleks kebutuhan kehidupan dari masalah yang kecil sampai pada sesuatu hal yang besar. *Kedua* misi eksternal bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru menempatkan RT sebagai wahana demokrasi rakyat dalam lingkup yang paling bawah sehingga diharapkan dapat melancarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan demi kepentingan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

RT dibentuk dari warga oleh warga dalam suasana mufakat, gotong-royong dan demokrasi sehingga proses pemilihan Ketua RT dan pengurus lainnya bebas dari politik uang sebab Ketua RT dan pengurus lainnya tidak mendapat imbalan materi (upah/honor dan bengkok). Jika pengurus RT memperoleh upah yang layak atau bengkok kemungkinan politik uang pada saat pemilihan Ketua RT akan terjadi dan pemerintahpun tidak akan melakukan dengan cara yang sesederhana ini. Walaupun pemilihan pengurus RT dalam suasana demokrasi tetapi masih diliputi oleh sikap hegemoni negara sebab pada saat proses pemilihan pengurus RT, pemerintah melibatkan diri (Kepala Desa/Lurah atas nama Camat) sehingga yang berkiper adalah supra desa. Pengurus RT yang terpilih sebelum mulai bekerja dilantik secara formal oleh Camat atas nama Bupati/Walikota dan pengurus RT yang dilantik tersebut adalah pengurus RT yang terpilih atas dasar musyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan, selanjutnya diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah. Dengan masa kerja tiga tahun tanpa memperoleh imbalan apapun, pengurus RT sebagian besar bekerja dengan semangat tinggi, yang melatar-belakangi mengapa pengurus RT bersedia bekerja dengan keras tanpa pamrih ? Karena di dalam masyarakat Indonesia sejak jaman nenek moyang telah terbangun jiwa korsa (semangat persahabatan dan persaudaraan yang

tinggi = talenta nenek moyang) pada akhirnya kebiasaan jiwa korsaluntur sampai saat ini dan melekat pula dalam kehidupan RT, dengan semangat tersebut maka siapapun pengurus RT terutama Ketua, lazim disetiap aktivitas rela untuk neneladani pengucuran materi, ide, gagasan, tenaga dan kesempatan yang pada akhirnya diikuti oleh pengurus yang lainnya serta masyarakat pada umumnya, yang semua itu dilakukan dengan suka rela. Sebagai contoh hasil musyawarah RT akan membangun gardu ronda, maka spontan dari warga ada yang menawarkan tanah, kayu, batu dan bahan lainnya, disisi lain ketika proses pembangunan gardu ronda berlangsung, secara suka rela masyarakat terdekat dengan lokasi dengan ikhlas mereka akan mengeluarkan minuman beserta kue-kue sederhana. Dengan demikian kemauan seseorang menjadi pengurus dan kesetiaan warga memberikan materi untuk kepentingan bersama di wilayahnya merupakan modal sosial yang sangat tinggi nilainya. Modal sosial yang terwujud dalam kehidupan RT merupakan peluang untuk mengembangkan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek. Hal ini dikuatkan bahwa pengurus RT (ketua) lazimnya dituntut untuk menjadi alternatif pemecahan masalah bagi warganya. Dydiet Harjito<sup>3</sup> berpendapat bahwa pemecahan masalah secara alternatif dapat dilakukan dengan cara brainstorming kepada seluruh warga yang hadir dalam forum RT.

### *RT Sebagai Basis Demokrasi Komunitarian*

Menurut Amin Rais<sup>4</sup> esensi demokrasi adalah musyawarah, jadi demokrasi dapat diformulasikan sebagai seni pergaulan hidup untuk mencapai kebaikan bersama, sebagai seni demokrasi dapat diwujudkan dalam bentuk prosedural dan kultural. Demokrasi kultural cenderung berpijak pada tatakrama dan budaya yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seperti sikap toleransi, terbuka, egalitarian, *mutual trust*, bertanggungjawab, kepedulian warga

---

<sup>3</sup> Dydiet Hardjito, *Pemecahan Masalah Yang Analitik* (Jakarta : Prenada, 2003) hlm. 75.

<sup>4</sup> Amin Rais, *Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit*, (Yogyakarta : Yayasan Benteng Budaya ), hlm. 67-69.

terhadap keputusan hasil musyawarah dan seterusnya. Jadi setiap warga mempunyai hak berbicara dan mempunyai kewajiban untuk mendengarkan setiap apa yang dibicarakan sehingga basisnya kolektif, semangat kebersamaan dalam wadah paguyuban/institusi RT.

Berdasarkan kajian sejarah demokrasi komunitarian berakar dari komunitas lokal dengan basis kolektif yang diwadahi dalam bentuk rembug desa, forum warga, paguyuban dan asosiasi sosial yang kesemuanya itu dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Karena RT memiliki wilayah yang sangat kecil dan dengan jumlah KK berkisar 15-25 di desa dan 20-50 di kota sehingga demokrasi komunitarian akan selalu tampak pada kegiatan RT, sebagai contoh forum RT selalu dimanfaatkan oleh warga setempat sebagai tempat untuk mengikat warganya dan di dalam ikatan itu masing-masing warga sangat menghargai atas otonomi individu dalam hal penghargaan, memberi kesempatan untuk memaksimalkan aktualisasi dalam kehidupan kolektif. Sekarang dapat kita bayangkan dalam kehidupan yang kecil, pemilihan Ketua RT misalnya semua warga (setiap KK mempunyai 1 suara) baik KK itu janda sekalipun terlibat secara langsung, dalam musyawarah itu masing-masing warga mempunyai hak, kesempatan dan kewajiban yang sama sehingga pemilihan pengurus RT jarang (hampir tidak pernah) dilakukan secara voting, tetapi selalu dilakukan atas musyawarah mufakat. Seandainya terjadi suara sama akan dibicarakan secara bijaksana dan pada saat pemilihan Ketua jarang ada suara abstain. Perilaku ini menunjukkan betapa demokrasinya suasana proses pemilihan Ketua dan pengurus RT lainnya.

Bentuk hegemoni supra desa sebatas membaca persyaratan dan rambu-rambu yang harus ditaati sehingga setelah rambu-rambu dipahami oleh warga, maka pemilihan itu ditentukan sendiri oleh warga dan warga secara sadar dan rela dengan institusi yang kuat mereka mencalonkan sosok orang dengan indikator sebagai berikut

1. Orang yang akan dicalonkan dan dipilih adalah orang yang menurut warga memiliki kelebihan pada bidang pendidikan atau pengalaman-pengalaman tertentu dengan pertimbangan memiliki peluang waktu untuk mampu melaksanakan tugas-tugas sosial kemasyarakatan dari RT.

2. Tidak membedakan antara penduduk pribumi dengan non pribumi.
3. Tidak melihat ukuran kekayaan.
4. Tidak mempertimbangkan tua dan muda, tidak terlibat pada kasus organisasi terlarang di Indoensia.
5. Bersifat nasionalis dan pada saat ini mulai muncul pemikiran untuk tidak membedakan jenis kelamin.

Suasana kehidupan demokrasi pada level RT semacam ini dapat dipertahankan, maka RT dimasa lalu, saat ini dan masa yang akan datang mampu menjadi basis pertahanan atas kepentingan supra desa, kepentingan politik dan kepentingan yang lainnya. Dengan demikian RT dapat dijadikan sebagai tali demokrasi bukan tali kebebasan sebab pada forum RT akan tercipta kesadaran kritis yang mengarah pada keselarasan hidup, baik secara kelembagaan formal maupun secara konvensional sehingga RT sebagai basis demokrasi mempunyai peran sebagai wahana komunikasi sosial dan media curhat antar warga, sebab dalam partisipasi tingkat RT tidak mengesampingkan pembilahan gender.

## B. RT Sebagai Basis Pembangunan Partisipasi

Manusia dengan sifat *homo sapien* tidak dapat melepaskan diri dengan interaksi karena interaksi merupakan saling ketergantungan dan keterhubungan antar manusia. Mereka berinteraksi dengan anggota keluarga, tetangga, petugas negara, teman kerja, saudara di tempat ibadah, di pasar dan seterusnya. Di tengah masyarakat interaksi sosial lebih dominan dan sangat kompleks. Sebagai individu sekaligus anggota masyarakat setiap orang pasti berinteraksi dengan pihak lain. Di tempat kerja seorang menjadi pejabat sehingga bawahan harus tunduk padanya, tetapi di masyarakat seseorang tersebut menjadi anggota Rukun Tetangga sehingga orang tersebut harus tunduk dan patuh kepada Ketua RT.

Interaksi yang ada dan terjadi berdasarkan nilai-nilai kebersamaan yang dapat berupa standar tingkah laku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (norma), faktor penting dalam berinteraksi itu adalah harus terjamin hak dan kewajiban setiap individu yang

Berinteraksi. Bila ada individu yang berinteraksi dalam bentuk pelanggaran norma dan kesepakatan maka bagi individu yang melanggar norma dan kesepakatan harus mendapat sanksi hukum dan sebaliknya yang patut terhadap norma dan kesepakatan bersama maka sepatasnya, mereka mendapat penghargaan. Dasar dan arah umum inilah sebenarnya yang kita sebut kultur.

Idealnya interaksi individu dalam kegiatan RT merupakan partisipasi yang mendasar, sebab dengan kesadaran individu berinteraksi menciptakan dinamika di dalam masyarakat. Dinamika di dalam masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan di tingkat RT. Jadi makna RT sebagai basis pembangunan partisipasi adalah bahwa organisasi formal yang berada di tingkat paling bawah dimanfaatkan sebagai wadah untuk berpartisipasi warga. Tetapi kondisi riil di dalam kehidupan masyarakat tingkat RT, baik yang berada di kawasan perdesaan maupun di kawasan perkotaan ada sebagianarganya yang mempunyai pandangan negatif terhadap RT, indikator pandangan ini antara lain :

1. Dirinya merasa direpotkan dengan kegiatan RT.
2. *Attitude* individu cenderung bersikap acuh tak acuh atau cuek terhadap aktivitas RT.
3. Tidak mau dilibatkan dan tidak mau melibatkan diri dan tidak ada rasa ingin tahu apa yang sedang dilakukan tetangganya atau masyarakat sekitar dalam kepentingan bersama di wilayahnya.
4. Kecenderungan lebih mengutamakan kepentingan dirinya dan keluarga.
5. Belum tentu menghadiri undangan dari warga setempat.
6. Ide, materi dan kesempatan sangat terbatas yang disumbangkan untuk kepentingan hidup bersama.

Bentuk partisipasi warga RT yang mempunyai pandangan positif terhadap RT memanfaatkan lembaga ini sebagai sarana bergaul dan berkomunikasi terhadap tetangga dan masyarakat sekitar, indikator pandangan positif terhadap RT dapat dilihat dari sikap masyarakat, diantaranya :

1. Bersedia menghadiri pertemuan warga RT secara rutin, bila tidak dapat hadir mereka memberitahu/ijin.



2. Dalam pertemuan/forum RT mereka memberikan pendapat/ide-ide yang berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan di wilayahnya.
3. Bersedia ronda dan hadir di kegiatan tersebut.
4. Memberikan dana atau materi lain untuk kegiatan bersama.
5. Bersedia ditempati untuk pertemuan warga secara bergilir.
6. Menghadiri kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Memiliki perhatian besar terhadap sistem keamanan dan sistem sosial dalam hidup bersama.

### *RT Sebagai Ruang Publik*

Forum RT baik di desa maupun di kota pada umumnya difungsikan untuk mengangkat pembicaraan yang bersifat serta-merta, artinya kasus apapun yang bersifat individu, kelompok apalagi menyangkut masyarakat luas selalu diangkat di forum RT, sehingga RT bersifat multi fungsi. Selain masalah pembangunan dan keamanan, topik yang masuk pada forum RT pada umumnya meliputi

1. Hajatan artinya bahwa warga yang mau mempunyai hajatan agar rencana pelaksanaannya berjalan lancar, maka warga dalam satu RT dilibatkan, baik tenaga, pikiran sampai materi. Sehingga forum RT bulanan tidak sebatas membahas kepentingan bersama tetapi membahas kepentingan individu. Kondisi ini lazim dan diterima secara serentak oleh warga, yang melatarbelakangi penerimaan ini karena semua warga merasa akan merepotkan tetangga pada waktu-waktu tertentu (bergilir/bergantian).
2. Perselingkuhan, seandainya warga RT ada kasus perselingkuhan maka forum RT diajukan pertama kali oleh masyarakat dan korban perselingkuhan untuk membantu menyelesaikan bahkan diminta untuk menghakimi secara tuntas dengan cara menangkap (*nggropyok*) agar perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali di wilayah RT. Dengan perilaku ini warga merasa malu dan akhirnya akan mengurangi kewibawaan/pelecehan pada wilayah RT tersebut, dari sinilah muncul kesepakatan *might makes right*.

2. Dalam pertemuan/forum RT mereka memberikan pendapat/ide-ide yang berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan di wilayahnya.
3. Bersedia ronda dan hadir di kegiatan tersebut.
4. Memberikan dana atau materi lain untuk kegiatan bersama.
5. Bersedia ditempati untuk pertemuan warga secara bergilir.
6. Menghadiri kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Memiliki perhatian besar terhadap sistem keamanan dan sistem sosial dalam hidup bersama.

### *RT Sebagai Ruang Publik*

Forum RT baik di desa maupun di kota pada umumnya difungsikan untuk mengangkat pembicaraan yang bersifat serta-merta, artinya kasus apapun yang bersifat individu, kelompok apalagi menyangkut masyarakat luas selalu diangkat di forum RT, sehingga RT bersifat multi fungsi. Selain masalah pembangunan dan keamanan, topik yang masuk pada forum RT pada umumnya meliputi

1. Hajatan artinya bahwa warga yang mau mempunyai hajatan agar rencana pelaksanaannya berjalan lancar, maka warga dalam satu RT dilibatkan, baik tenaga, pikiran sampai materi. Sehingga forum RT bulanan tidak sebatas membahas kepentingan bersama tetapi membahas kepentingan individu. Kondisi ini lazim dan diterima secara serentak oleh warga, yang melatarbelakangi penerimaan ini karena semua warga merasa akan merepotkan tetangga pada waktu-waktu tertentu (bergilir/bergantian).
2. Perselingkuhan, seandainya warga RT ada kasus perselingkuhan maka forum RT diajukan pertama kali oleh masyarakat dan korban perselingkuhan untuk membantu menyelesaikan bahkan diminta untuk menghakimi secara tuntas dengan cara menangkap (*nggropyok*) agar perbuatan tersebut tidak dilakukan kembali di wilayah RT. Dengan perilaku ini warga merasa malu dan akhirnya akan mengurangi kewibawaan/pelecehan pada wilayah RT tersebut, dari sinilah muncul kesepakatan *might makes right*.

3. Kenakalan remaja, dalam arti miras, mabuk, perjudian dan bentuk kenakalan lain juga menjadi topik yang diangkat di forum RT, untuk diselesaikan bersama secara kekeluargaan.
4. Anak kost, kasus di wilayah perkotaan atau pinggiran (daerah yang ada penghuni kost-kostsan) sedikit banyak ada anak kost yang perilakunya tidak mentaati *custom* setempat atau mengganggu masyarakat sekitar, sehingga anak kost perlu ditangani secara khusus. Dari kasus ini maka perlu dilakukan pendataan tentang anak kost, induk semang wajib melaporkan anak kostnya kepada pengurus RT dan di forum ini akhirnya dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur tentang anak kost.
5. Pertanian, secara khusus RT pada wilayah perdesaan yang erat dengan masalah pertanian maka forum ini juga menjadi salah satu semangat warga untuk hadir, karena warga menganggap forum ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan pertanian. Forum ini dipergunakan untuk diskusi harga bibit dan harga pupuk, pemberantasan hama, masalah pengairan dan membicarakan proses produksi pertanian lainnya.
6. Selain topik-topik di atas masih banyak lagi yang diangkat pada forum RT diantaranya adalah masalah pertanahan, penggusuran, pajak, pemulung, sampah dan lain-lain. Yang jelas bahwa RT menjadi gudang ruang publik yang mau tidak mau dipaksa untuk menampung dan menyelesaikan. Se jauh mana kualitas solusi yang diberikan dan solusi merupakan *the good life*.

### *RT Sebagai Basis Desentralisasi*

Definisi Desentralisasi dalam UU Nomor 22/1999 adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada Kepala Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>5</sup>. Format ini sungguh raksasa sehingga RT dalam koridor desentralisasi merupakan bagian kecil dan turut mewarnai praktek-praktek kehidupan desentralisasi.

---

<sup>5</sup> Pemerintah Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 tentang Penyerahan wewenang pemerintahan kepada kepala otonomi, hlm. 16.

Para pembaca, janganlah membayangkan praktek desentralisasi pada tingkat RT seperti pada desentralisasi tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Tetapi desentralisasi di tingkat RT merupakan desentralisasi yang cenderung pada praktek-praktek pekerjaan sosial. Jadi RT diberi ruang yang luas untuk melakukan fungsi kepanjangan tangan pemerintah di atasnya, baik yang bersifat vertikal dan diagonal dimulai dari pekerjaan rukun warga, Kadus, Lurah, Camat, Bupati dan Gubernur-pun dilaksanakan oleh RT.

Pekerjaan RT misalnya menarik pajak, mengatur system keamanan lingkungan, pendataan penduduk miskin, pendataan pemakaian kontrasepsi, pendataan penderita penyakit kronis, penertiban kartu tanda penduduk, persiapan Pemilu dalam Pantarlih dan masih banyak lagi tugas yang harus dikerjakan oleh RT, yang sebenarnya bukan porsinya. Jelas RT dalam ruang desentralisasi cenderung sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang mengarah pada fungsi administrative.

### *RT Sebagai Basis Modal Sosial*

Modal sosial merupakan suatu kekuatan yang mewujudkan komunitas *civil community*, menurut Putnam<sup>6</sup> kemampuan komunitas warga mewujudkan kehidupan yang demokratis karena dalam komunitas seperti ini selalu terlembaga: 1) kesepakatan-kesepakatan, 2) kesetaraan secara politis dan solidaritas, 3) kepercayaan dan toleransi serta 4) struktur sosial yang kooperatif antar warga. Kuatnya modal sosial tidak sebatas pada kehidupan demokrasi tetapi juga akan berdampak pada kinerja ekonomi masyarakat. Pengalaman di Bangladesh, langkah yang jitu untuk memberdayakan masyarakat akar rumput adalah menghidupkan berbagai institusi sosial sebagai suatu perkumpulan warga secara horizontal dan membuka peluang modal sosial tersebut bekerja sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang kuat disertai ketahanan ekonomi yang mapan sebagai kekuatan kemandirian.

---

<sup>6</sup> Robert D. Putnam, *Making Democracy Work : Civic Traditionans in Modern Italy* (New York : Princeton, Simon and Schuster), hlm. 173.

RT sebagai *civil community* memiliki kuantitas dan kualitas kehidupan sosial-kelembagaan yang secara *cultural* berupa norma, nilai dan peranan sosial berpengaruh terhadap tingkat kepuasan heterogenitas kelompok dan fungsionalisasi kelompok. Wujud dari norma, nilai dan peranan sosial akan terbukti ketika interaksi antar warga dalam partisipasi memberikan sumbangan pembangunan sosial ekonomi dan partisipasi dalam turut serta mengambil keputusan kelompok. Jadi pemberdayaan tingkat RT diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga RT, tingkat kemandirian dapat dibangun melalui :

1. Aspek sosial, aspek ini menekankan pada kemampuan masyarakat dalam mengelola proses perubahan sosial, kemampuan meningkatkan keberadaan institusi, kemampuan *indigenous knowledge* dan kemampuan partisipasi masyarakat.
2. Aspek ekonomi, menekankan pada kemampuan masyarakat menggali potensi ekonomi, mengembangkan dan memiliki kemampuan dalam persaingan.
3. Aspek politik, diarahkan pada penguatan kekuasaan secara desentralisasi, mampu menciptakan proses demokrasi dan otonomi agar tercipta tradisi mengontrol atas kemampuan kinerja institusi di atasnya, seperti RW, Kadus, Lurah, BPD dan seterusnya.

Berangkat dari kerangka di atas, maka sebagian tugas pokok RT menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat maka selayaknya jika hegemoni negara, supra desa dan tekanan pihak-pihak luar dibatasi sehingga RT diberi wewenang secara proporsional dalam mengambil keputusan dalam rangka membangun dirinya dan lingkungan secara mandiri serta diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Hal ini perlu dikedepankan karena kita semua tahu bahwa RT ternyata menyimpan beraneka sumber daya dan sumber biaya sebagai wujud kongrit dari modal sosial. Sumber daya RT yang dapat diakses antara lain :

### 1. Sumber daya alam

RT memiliki batas geografis yang jelas, dalam wujud fisik sangat sempit sehingga jumlah penduduk dalam kondisi mudah terpantau.

Karena wilayahnya sangat terbatas maka setiap pengurus RT akan memahami geografis wilayahnya sehingga potensi alam (terutama di pedesaan) sangat dipahami oleh pengurus RT, akses terhadap pemahaman pengurus RT terhadap sumber daya alam akan mempermudah masyarakat dan pihak luar mengakses guna memanfaatkan alam, dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat, seperti kemampuan alam untuk menyediakan lahan tempat tinggal, lahan pertanian di desa, lokasi bermain/rekreasi di kota, tingkat kesuburan tanah dan jenis flora-fauna di wilayahnya. Pada akhirnya akan diketahui oleh pengurus RT faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat pembangunan dari aspek sumber daya alam.

## 2. Sumber daya tehnologi

Tehnologi apapun yang dimiliki oleh masyarakat baik yang bersifat ringan (ketrampilan), sedang dan berat semuanya berada dalam gabungan geografis RT, dengan memahami kepelikan teknologi diharapkan nantinya dapat dilakukan *exchange tehnologi* yaitu pertukaran tehnologi satu dengan yang lain, sehingga konsep pemberdayaan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sesuai dengan situasi sosial masyarakat setempat.

## 3. Sumber daya manusia

Semua penduduk di negara Indonesia secara administratif tercatat dalam tingkat bawah yaitu RT, sehingga semua data yang ada pada berbagai instansi sangat dipengaruhi oleh data yang ada di tingkat RT. Agenda kebijakan yang sangat penting di dalam pembinaan sumber daya manusia di tingkat RT adalah tidak dibatasi oleh kelompok birokrasi (Lurah, Camat dan vertikal) tetapi sebaiknya memberi kesempatan pihak luar, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan instansi lain yang berkepentingan. Materi pengembangan sumber daya manusia tidak terbatas pada bidang administratif tetapi lebih bermakna pada materi yang *holistic* terutama *soft skill*, pengetahuan dan tehnologi yang dilandasi pengembangan IQ dan EQ sebagai basisnya. Dengan penguasaan ketrampilan,

pengetahuan dan teknologi diharapkan akan merembes terhadap aspek-aspek yang lain. Sumber daya manusia di tingkat RT sangatlah penting, artinya dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat yang *holistic*.

#### 4. Sumber daya sosial

Sosial dapat diartikan berbagai aspek, seperti hubungan/keterikatan, bantuan, sukarela dan seterusnya, yang jelas sumber daya sosial merupakan modal sosial yang beradan di wilayah RT, sedangkan modal sosial merupakan kesepakatan pemikiran mental (individu, keluarga, kelompok) untuk meningkatkan pembangunan partisipasi dengan basis *trust*, idiologi, religi, keswadayaan, ekonomis dan mengarah pada sikap demokrasi<sup>7</sup>. Bentuk-bentuk modal sosial yang ada di RT antara lain :

- a. Tradisi fisik, seperti gotong-royong, kerja bakti, tradisi sumbang-menyumbang dan tradisi natural. Dari tradisi ini akan bermanfaat pada *social welfare*, demokrasi dan *engagement*.
- b. *Sosial trust*, modal ini akan mengarah pada pertumbuhan bidang kesejahteraan dan ekonomi dampak yang diharapkan dari bidang ini mampu merembes pada bidang-bidang lain seperti kesehatan rohani, kesehatan fisik dan kesehatan lingkungan.
- c. Institusi sosial, seperti norma dan nilai-nilai yang terpelihara dalam suasana kehidupan tertib, kepemimpinan, jaringan sosial, kohesi sosial dan kemanusiaan. Pada prinsipnya akan melakukan control sosial terhadap perilaku warga RT setempat. Bentuk-bentuk aksi dari modal sosial di RT antara lain : arisan, komitmen, jaringan motivasi untuk berorganisasi bersama, kearifan lokal, kepemimpinan sosial, prinsip keseimbangan, sumbang-menyumbang, dan gotong-royong, contoh tradisi *nebakke* yaitu tradisi masyarakat Gunung Kidul.

Sumber dana pembiayaan RT yang dapat diakses adalah segala aktifitas RT dibiayai sendiri sehingga pembangunan RT benar-benar

---

<sup>7</sup> Sugiyanto, *Pembaharuan Desa Sentuhan Kebutuhan atau Budaya* (Yogyakarta: Ganesha Wacana Pembangunan Masyarakat Volume V.No.10 Mei 2004), hlm. 53.

bersifat swadaya, sebagai contoh RT baik di desa maupun di kota aktifitas pembangunan terus menerus tanpa berhenti, seperti conblokisasi, neonisasi, perbaikan sarana ibadah, perbaikan dan pembuatan gapura, jalan dan seterusnya. Di balik semua itu bahwa pembangunan bangsa pada dasarnya juga di biayai oleh RT, dalam hal ini RT juga menjadi tangan panjang pemerintah dalam berbagai model aktivitas dan pembangunan seperti pengurus RT membagikan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan melakukan pendataan penduduk untuk kepentingan berbagai instansi.

Seberapa besar jasa pengurus RT sebagai modal sosial yang telah diberikan kepada berbagai instansi, seperti Dina Sosial dalam pendataan warga miskin, informasi pentingnya IMB dalam membangun tempat tinggal, dan menyebarkan berbagai informasi pembangunan, serta membantu negara dalam hal mengamankan wilayahnya, mengawasi penduduk yang berperilaku menyimpang, membantu Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, kebersihan lingkungan dan rumah sehat, membantu Dinas Peternakan, membantu BKKBN dalam pendataan warga Pasangan Usia Subur dan penggunaan jenis alat kontrasepsi, membantu Departemen dalam negeri dalam penertiban administrasi KTP dan KK, membantu Departemen Pendidikan Nasional dalam melacak data anak putus sekolah dan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh.

Jika serangkaian tugas sosial yang telah dilakukan oleh Pengurus RT di atas dianggarkan pemerintah, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Maka tepatlah jika RT merupakan sumber pembiayaan kerana RT harus menanggung berbagai beban pembiayaan, baik dalam kehendak sendiri maupun dalam suasana kegotong-royongan, pembangunan fisik lingkungan dan melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah di atasnya.

Memahami semua tugas dan tanggung jawab RT di atas, maka agenda yang perlu dicatat oleh pemerintah adalah memberikan otonomi secara luas, sentral dan memelihara otonomi asli yang ada di RT. Strategi pemberdayaan RT sebaiknya menggunakan pendekatan *basic needs*, *bottom up*, partisipasi, *cross sectoral* dan pendekatan teknologi yang tepat guna.



Pembangunan merupakan proses perubahan yang mengarah pada perbaikan berbagai sektor dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pembangunan yang dilakukan di tingkat RT merupakan hasil kombinasi dari unsur lokal dengan program pembangunan tingkat kabupaten-kota (daerah). Menurut Sunyoto Usman<sup>8</sup> pembangunan daerah mempunyai watak dan ciri tersendiri serta memiliki pola dan spirit yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Pendapat tersebut senafas dengan pandangan Coralie Bryant dan Louse White dalam *Managing Development in the Third World 1982* bahwa pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Menurut pendapat mereka ada 5 (lima) implikasi sebagai pembuktian dalam proses pembangunan :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*)
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya, kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara satu dengan yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*inter dependent*)

Jika pendapat di atas dirujuk pada konsep pemberdayaan, maka pengertian pembangunan ini mendekati pada sasaran dan harapan universal pembangunan di Indonesia yang dituangkan melalui GBHN

---

<sup>8</sup> Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 11-18.

tahun 1998 dan gayut dengan konsep atonomi daerah yang ditegakkan melalui UU No. 22 tahun 1999.

Data empiris di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di tingkat RT dimungkinkan diperoleh atas faktor-faktor, antara lain :

### 1. Terlalu luasnya pengaruh supra desa.

Palaksanaan dari supra desa untuk melakukan proses pembangunan sehingga muncul perilaku manipulasi data. Pada masa Orde Baru kegiatan ini berjalan dengan prinsip asal bapak senang (ABS), bapak yang dimaksud adalah Lurah, /Kepala Desa, Camat atau Bupati. Contoh Kelompok Tani Wanita (KTW) Dusun Bendungan Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mewakili Provinsi D I Y dalam lomba INSUS Kedelai, maka supra desa memberi perintah kepada seluruh RT di Bendungan untuk memperbaiki jalan yang akan dilalui oleh tim penilai, pagar rumah dan pekarangan harus rapi an bersih, administrasi KTW harus di lengkapi dengan berbagai data yang diperlukan. Jika ada yang belum dimiliki dan belum dikerjakan harus diselesaikan dengan cara lembur. KTW harus dapat menunjukkan hasil dan hasil yang belum maksimal supra desa berupaya mencari peminjaman, setelah lomba selesai harus dikembalikan. Dari contoh kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa habit asal bapak senang (ABS) ternyata masih melekat pada sebagian masyarakat tertentu.

### 2. Rezim Pengurus RT

Survey membuktikan bahwa ada seorang pengurus RT terutama ketua yang menjabat sampai belasan tahun, faktor-faktor yang menyebabkan bertahannya seorang ketua ini, antara lain :

#### a. Ambisi dan motivasi diri.

Demi kepentingan *power* di wilayahnya maka orang tersebut merasa senang dan bangga dengan jabatan tersebut sehingga ketika masa jabatannya habis mereka melakukan aksi agar dipilih lagi oleh masyarakat setempat. Kasus semacam ini memberi keuntungan kepada dua pihak, pertama orang

yang terpilih karena ambisi diri, biasanya lebih bertanggung-jawab terhadap tugas yang harus diemban. Kedua akan berdampak positif terhadap masyarakat dalam wujud pelaksanaan pembangunan dalam segala aspek atas dasar kebutuhan warga setempat.

b. Penolakan.

Pada survey ini menunjukkan berlawanan terhadap yang pertama artinya setiap warga yang ditunjuk untuk menjabat ketua RT belum tentu bersedia karena alasan-alasan tertentu dan masyarakat dapat menerima alasan tersebut. Ketika ketua RT atas mufakat dan musyawarah tidak bersedia dan dipaksakan oleh warga agar tetap menjadi ketua RT, akan berdampak kurang menguntungkan terhadap kedua pihak. Pertama terhadap ketua RT itu sendiri di dalam menjalankan tugasnya santai waktu yang diluangkan sangat mereka batasi dari aspek *responsibility* agak lemah. Kedua karena Ketua RT sendiri kurang termotivasi diri maka pembangunan dalam aspek apapun tidak dapat maksimal.

c. Kompetisi yang sehat

Arah yang positif terhadap pembangunan di wilayah RT bila dilandasi oleh perasaan persaingan yang sehat artinya pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dalam koridor *egalitarian*, *mutual trust*, pembangunan demi kepentingan dan kepedulian warga, toleransi dan terbuka. Ketika kesadaran itu muncul dari warga, maka ide/gagasan dibangun sejak proses perencanaan, menemukenali kebutuhan warga dan mencari sumber pemenuhan kebutuhan, baik dari segi pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.

d. Dampak imitasi masyarakat

Sifat wajar dan manusiawi jika seseorang atau sekelompok orang mempunyai perasaan iri, berkeinginan/bercita-cita dan muncul nafsu membangun. Situasi ini banyak kita saksikan di desa maupun di kota banyak pembangunan (fisik,

non fisik dan kegiatan sosial lainnya) yang dilakukan oleh warga RT yang bukan kehendak awal yang diletakkan pada program kerja RT, tetapi melakukan pembangunan atas perasaan iri atau muncul hasrat ingin meniru atau mengikuti atas keberhasilan pada wilayah di luar RT yang bersangkutan. Sebagai contoh RT 13 berhasil membangun gardu ronda maka RT 11 ikut-ikutan membangun gardu ronda. RT 16 membuat lapangan futsal sebagai tempat rekreasi anak-anak maka RT 13 ganti ikut-ikutan membangun lapangan futsal yang difungsikan sama dengan RT 16.

e. Kesadaran masyarakat yang tinggi

Tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun diri dan lingkungannya sangat bervariasi. Semua dipengaruhi banyak faktor misalnya faktor kebiasaan hidup, keyakinan, ekonomi dan yang lain. Bagi masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi atas kepentingan bersama dan tanpa membedakan kelas-kelas dalam masyarakat maka akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di wilayah RT.

f. Di injeksi oleh pihak luar

Pada saat ini sudah nampak bahwa dominasi negara terhadap rakyat lokal mulai berkurang dan seharusnya intervensi negara diarahkan pada *self organizing* atau kebersamaan dan fasilitasi. Namun demikian jika ada injeksi pihak luar terhadap RT juga akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan pembangunan. Pihak luar sering melakukan injeksi terhadap kegiatan pada level RT antara lain perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan lembaga-lembaga religius. Jadi RT pada dasarnya merupakan pintu gerbang terhadap pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu perlu dibangun pola komunikasi yang efektif dan keamanan dalam menyelaraskan potensi lokal dan pengaruh dunia.

## RT Sebagai Model Pembangunan Alternatif

Keberhasilan pembangunan masa Orde Baru sangat tergantung pada strategi tiga kaki yang meliputi Militer (ABRI), Parpol (Golkar) dan Birokrasi sebagai pelaku pembangunan dengan model pembangunan *top down*.

Menegok hambatan pembangunan masa Ode Lama dan Orde Baru dengan berbagai model pembangunan ternyata masih ada sisi lemah (khususnya pada masyarakat *grass root*) oleh sebab itu penulis tawarkan sebuah pemikiran "RT Sebagai Suatu Model Pembangunan", artinya bahwa pelaksanaan pembangunan di masa lalu masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan apalagi pelaku pembangunan. Berdasarkan beberapa pemikiran di atas mengenai keberadaan RT, maka penulis meyakini jika RT diperlakukan seperti konsep pemberdayaan yang benar maka RT mampu menjadi suatu model pembangunan. Di sisi lain semua bantuan yang datang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak-pihak lain seyogyanya langsung diterimakan kepada pengurus RT tanpa banyak prosedur (potong kompas) dan penyunatan dana sehingga nantinya model pembangunan ini akan terus merumuskan pembangunan sebagai akar dari bawah (*bottom up*).

Sebagai bahan perenungan bahwa sesungguhnya RT itu menjadi kepanjang-tangannya pemerintah, sebab hampir semua konsep, ide dan kebijakan yang dibuat oleh biroktar dan *leading state* dalam prakteknya akan dijalankan oleh warga RT, sebagai contoh penarikan berbagai macam iuran dan stimulan sampai pada pelaksanaan pembangunan dan di dalam RT akan terjadi dinamika pembanguna yang berkelanjutan karena RT mempunyai program berjangka dan bertahap. Sebagai bukti dapat dirunut dari mekanisme keberhasilan pembangunan suatu desa (kasus desa swasembada dan desa teladan) sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat tingkat RT. Dengan demikian RT dapat kita yakini sebagai kaki pembanguna bangsa.

Di sisi lain RT sebagai model pembangunan dapat kita analisis dari pendekatan fungsi bahwa RT memiliki kekuatan untuk menjembatani antara model *top down* dan *bottom up*. Kekuatan ini

tercermin bahwa di dalam RT tercipta suasana *self organizing*, keseimbangan, semangat kebersamaan, non dominatif, penuh partisipatif, *mutual trust, common goal*, ada aksi bersama dan sharing pengetahuan.

Jika ke depan RT dapat dijadikan sebagai salah satu model pembangunan maka harapan besar akan tercipta *good governance* pada tataran institusi paling bawah dan nantinya dapat meluas pada institusi lebih tinggi di atasnya. Akses yang diharapkan adalah bahwa di tingkat RT akan selalu terjadi perubahan yang tidak terbatas dalam segala aspek kehidupan manusia, berbasis hukum dan memperoleh perlindungan politik formal yang jelas. Perubahan di RT bukan perubahan *ad hoc* dan *sporadic* tetapi perubahan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu masalah ke depan yang harus dihadapi dalam menciptakan RT sebagai model pembangunan adalah rawannya rekayasa sosial maksudnya kelompok-kelompok kepentingan dan terjadinya politisasi serta kekhawatiran jika masih ada intervensi yang terlalu mendalam.

### C. Penutup

Pandangan Edi Suharto bahwa pemberdayaan sebagai proses dan tujuan<sup>9</sup>, proses memberikan kekuasaan dan proses memungkinkan masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat kesejahteraan. Maka gayut dengan konsep pemberdayaan di atas RT sebagai agen pemberdayaan masyarakat telah terbukti bahwa RT mampu menjadi media pemberdayaan dan pengembangan modal sosial. Sebagai penutup penulis tegaskan ada tiga kunci dalam pemberdayaan di level RT, ketiga hal tersebut adalah :

1. Pemberdayaan bermakna memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat (RT), masyarakat memikul kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya.
2. Upaya pemberdayaan masyarakat berarti mamampukan masyarakat secara holistik dalam segala bentuk kesempatan dan waktu.

---

<sup>9</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 59.

3. RT sebagai agen pemberdayaan harus mampu menjadi wahana menyalurkan aspirasi bukan kooptasi dan marjinalisasi untuk itu ada 3 (tiga) hal yang penulis rekomendasikan :
  - a. RT pada masyarakat *grass root* perlu ada pendampingan guna untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat sehingga dapat memahami secara seksama agar mampu mengaktualisasikan aspirasi mereka (nuansa peningkatan ekonomi). Aspirasi dengan semangat mengangkat masalah dan penderitaan yang ada dalam nuansa *delegitimasi*.
  - b. Penulis tawarkan pemikiran sekiranya RT dapat dijadikan sebagai model pembangunan yang berbasis *bottom up approach*.
  - c. Yang perlu di junjung dan dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pintu RT adalah adil dengan kompas keterbukaan-tanggungjawab, sosial-kesejajaran, maju dan berbudaya dengan nafas modernisasi guna menyongsong peradapan masa depan yang selalu berbudaya. Kebudayaan di masa depan harus menutup pintu bagi tradisi feodal dan preman, lestari dengan arah jatah hari ini kita harus ingat jatah untuk generasi masa depan harus tersedia.
  - d. RT dapat dijadikan sebagai garda pembangunan terdepan bagi bangsa Indonesia karena di dalam RT tersimpan berbagai modal sosial, sumber pembiayaan, sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber-sumber daya lainnya.

#### Daftar Pustaka

- Amin Rais, *Menyembuhkan Bangsa Yang Sakit*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999.
- Dydiet Hardjito, *Pemecahan Masalah Yang Analitik (Analytical Program Solving)*, Jakarta: Prenada, 2003.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Hari Martono dan Sugiyanto, *Pengorganisasian Masyarakat*, Modul Matakuliah, Program Studi ILMU Sosiatri, Yogyakarta: STPMD "APMD", 2004.
- Moeljarto Tjokrowinoto, *"Pembangunan Dilema dan Tantangan"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 7 tahun 1983, tentang "Pembentukan Rukun tetangga dan Rukun Warga", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robert D. Putnam, *Making Democracy Work :Civic Traditionans in Modern Italy*, New York: Princeton, Simon and Schuster, 1993.
- Sugiyanto, *Pembaharuan Desa Sentuhan Kebutuhan Atau Budaya*, Buletin Ganesha Wacana Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: STPMD "APMD", 2004.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.